



ABSTRAKSI

Di era pascareformasi, Indonesia memasuki rezim pembangunan nasional yang semakin selaras dengan wacana pembangunan global. Salah satu bentuk keselarasan yang dapat disoroti adalah kemunculan “pembangunan kepemudaan” dalam pembangunan nasional pada tahun 2009, sebagaimana “*youth development*” dalam strategi pembangunan global yang muncul di awal 2000-an. Melalui wacana ini, pemuda dijadikan kategori sosial baru yang memiliki rangkaian pemaknaan, kebijakan, dan ekspektasi yang spesifik. Aspek yang dapat disoroti dari wacana pembangunan kepemudaan adalah bahwa pembangunan terhadap pemuda selalu soal produktivitas ekonomi pemuda dan kontribusinya terhadap masalah-masalah sosial ekonomi. Analisis ini tidak terlepas dari konteks pembangunan neoliberal global sebagai wacana hegemonik. Menggunakan metodologi Analisis Kritis Wacana Fairclough, skripsi ini menganalisis pembangunan kepemudaan sebagai bentuk kepengaturan (*governmentality*) terhadap generasi muda. Skripsi ini menguraikan mekanisme kuasa pengetahuan yang hadir dalam usaha-usaha menjadikan pemuda sebagai subjek *self-governing* yang secara otonom menginternalisasi dan mereproduksi norma-norma pembangunan serta mendukung status quo. Analisis dilakukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen kenegaraan yang menjadi dasar strategi pembangunan kepemudaan di Indonesia.

Kata-kata kunci: wacana pembangunan, pascareformasi, pembangunan kepemudaan, kepengaturan, neoliberalisme, Indonesia.



ABSTRACT

In the post-reform era, development in Indonesia has been increasingly harmonized with global development regime. This is indicated by, among others, the presence of “youth development” within national development agenda starting in 2009, preceded by its global agenda counterpart in the beginning of 2000s. Through “youth development”, youth is treated as new social category to which specific meanings, policies, and expectations are imposed. One important aspect to highlight is that development initiatives and programs targeted at youth always positions them in terms of their economic productivity and contribution to social problems. The analysis puts into account the context of neoliberal development as hegemonic discourse. Utilizing Fairclough’s Critical Discourse Analysis, this thesis analyzes youth development as governmentality to young generation. This thesis construes mechanism of power and knowledge that presents in the effort of constructing youth as a self-governing subject, who internalize and reproduce developmental norms as well as supporting status quo. The object of the research are Law No. 40/2009 (UU Kepemudaan) and National Medium-Term Development Plan (RPJMN), as the basis of youth development strategies in Indonesia.

Keywords: *development discourse, post-reform, youth development, governmentality, neoliberalism, Indonesia.*